

**PERANAN PENGAWASAN DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN  
TERPADU SATU PINTU TERHADAP USAHA KARAOKE YANG MELANGGAR  
PERATURAN DAERAH DI KABUPATEN INDRAGIRI HILIR**

**EXECUTIVE SUMMARY**



DISUSUN OLEH  
ADRIAN ARIANSYAH EFENDI  
1810012111321

Program Kekhusuan  
Hukum Tata Negara

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS BUNG HATTA  
2023**

**No.Reg:01/Skripsi/HTN/FH/II-2023**

**FAKULTAS HUKUM**  
**UNIVERSITAS BUNG HATTA**

**LEMBAR PERSETUJUAN EXECUTIVE SUMMARY**

**No.Reg:01/Skripsi/HTN/FH/II-2023**

**Nama : ADRIAN ARIANSYAH EFENDI**

**NPM : 1810012111321**

**Program Kekhususan : Hukum Tata Negara**

**Judul Skripsi : PERANAN PENGAWASAN DINAS PENANAMAN MODAL  
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU TERHADAP  
USAHA KARAOKE YANG MELANGGAR PERATURAN  
DAERAH DI KABUPATEN INDRAGIRI HILIR**

Telah dikonsultasikan dan di setujui oleh Dosen Pembimbing dan dapat untuk di upload  
ke website:

**Dr. Sanidjar Pebrihariati R, S.H., M.H (Dosen Pembimbing) : (.....)**



# PERANAN PENGAWASAN DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU TERHADAP USAHA KARAOKE YANG MELANGGAR PERATURAN DAERAH DI KABUPATEN INDRAGIRI HILIR

Adrian Ariansyah Efendi<sup>1</sup> , Dr. Sanidjar Pebrihariati R, S.H., M.H<sup>1</sup>  
Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bung Hatta  
Email: [adrianariansyah77@gmail.com](mailto:adrianariansyah77@gmail.com)

## ABSTRAK

*Indragiri Hilir Regency Regional Regulation Number 11 of 2016 Concerning Guidance, Supervision, and Enforcement of Public Order and Community Diseases aims to eradicate deviant acts. Violations are still being found, so supervision is needed by the Investment and One-Stop Services Office of Indragiri Hilir Regency. Problem Formulation: 1) How is the supervision carried out by the Investment and One-Stop Service Office against karaoke businesses that violate local regulations? 2) What obstacles did you face? 3) What efforts have been made? Research Methods: Sociological Legal Research, using primary and secondary data sources, data collection techniques using document studies and interviews, and using qualitative data analysis. Research Results: 1) Supervision is carried out with raids every month but there are still karaoke businesses that commit violations 2) Obstacles faced with Geographical Conditions, Human Resources, Community Insensitivity, and Application of Sanctions 3) Efforts are made to increase Personnel, Invite Cooperation with Non-Governmental Organizations, Socialization, and Revision of Regional Regulations.*

*Keyword: Supervision, Licensing, karaoke business*

---

## I. PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pembinaan, Pengawasan, Dan Penindakan Ketertiban Umum, Dan Penyakit Masyarakat mengatur penyelenggaraan usaha termasuk usaha karaoke yang memuat atas Kewajiban yang harus ditaati Pelaku Usaha Karaoke, Sanksi dan hak-hak masyarakat atas penyelenggaraan usaha yang tidak mematuhi aturan yang telah ditetapkan didalam Peraturan Daerah

serta ketentuan dan larangan-larangan dalam melaksanakan usaha karaoke.

Berdasarkan data pra-penelitian dari pernyataan Winda Tanjung Sari, Kasi Pelayanan Perizinan Usaha dan Nonperizinan Sektor Tersier Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Indragiri Hilir, menyampaikan banyak para pelaku usaha karaoke di Kabupaten Indragiri Hilir yang melanggar aturan yang ditetapkan didalam Peraturan Daerah, seperti izin buka tempat usaha hiburan seperti karaoke hanya boleh

buka hingga jam 00.00 WIB.<sup>1</sup> Namun masih ditemui beberapa pelaku usaha karaoke yang masih membuka usahanya hingga subuh dan pelanggaran-pelanggaran lainnya.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis melakukan penelitian yang berjudul **“PERANAN PENGAWASAN DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU TERHADAP USAHA KARAOKE YANG MELANGGAR PERATURAN DAERAH DI KABUPATEN INDRAGIRI HILIR”**

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimanakah Pengawasan yang dilakukan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu terhadap usaha karaoke yang melanggar Peraturan Daerah di Kabupaten Indragiri Hilir?
2. Apa saja Kendala-Kendala yang dihadapi Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dalam Melakukan Pengawasan terhadap Usaha Karaoke Yang Melanggar Peraturan Daerah di Kabupaten Indragiri Hilir?
3. Apa saja Upaya-Upaya yang dilakukan Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu untuk melakukan Pengawasan terhadap Usaha Karaoke Yang Melanggar Peraturan Daerah di Kabupaten Indragiri Hilir?

## **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk menganalisa Pengawasan yang dilakukan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu terhadap usaha karaoke yang melanggar Peraturan Daerah di Kabupaten Indragiri Hilir
2. Untuk menganalisa Kendala-Kendala yang dihadapi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Untuk Melakukan Pengawasan Terhadap Usaha Karaoke yang melanggar Peraturan Daerah di Kabupaten Indragiri Hilir
3. Untuk menganalisa Upaya-Upaya yang dilakukan Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu untuk melakukan Pengawasan terhadap Usaha Karaoke Yang Melanggar Peraturan Daerah di Kabupaten Indragiri Hilir.

## **II. METODE PENELITIAN**

1. Jenis Penelitian yang digunakan adalah Hukum Sociologis.
2. Sumber Data terdiri dari Sumber Data Primer dan Sumber Data Sekunder.
3. Teknik Pengumpulan Data Menggunakan Wawancara dan Studi Dokumen.
4. Teknik Analisis Data menggunakan Analisis Kualitatif.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup><https://bertuahpos.com/hukum/tak-berizin-tempat-karaoke-new-paradise-di-inhil-rayakan-valentine-hingga-subuh.html>,

---

<sup>2</sup>Soerjono Soekanto, 1983, *Pengantar Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta. hlm. 78

### III. HASIL PENELITIAN DAN

#### PEMBAHASAN

##### **A. Pengawasan yang dilakukan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu terhadap usaha karaoke yang melanggar Peraturan Daerah di Kabupaten Indragiri Hilir**

Saat melakukan operasi Razia, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dengan Instansi terkait menemukan bahwa masih ada tempat karaoke yang menjual minum-minuman keras dan bahkan ada menyediakan wanita sebagai Pemandu lagu atau *Ladies Club*, yang semua itu sudah sangat jelas melanggar Peraturan Daerah.

Dalam melakukan pengawasan dalam menjalankan Peraturan Daerah menurut Ibu Winda Tanjung Sari, dibagi dalam 3 bentuk yaitu:

- a. Pengawasan Intern dan Ekstern
- b. Pembinaan
- c. Penertiban

Dalam pelaksanaan pengawasan pemerintah masih kurang terhadap penyelenggaraan usaha karaoke di Kabupaten Indragiri Hilir karena hal ini masih terdapat beberapa usaha karaoke yang melanggar Peraturan Daerah bahkan ada yang tidak memiliki tanda daftar usaha pariwisata dibiarkan beroperasi hingga dini hari.

##### **B. Kendala-Kendala yang dihadapi Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dalam Melakukan Pengawasan terhadap Usaha Karaoke Yang Melanggar Peraturan Daerah di Kabupaten Indragiri Hilir**

Kendala-kendala yang dihadapi menurut Ibu Winda Tanjung Sari adalah:

- a. Kondisi Geografis
- b. Sumber Daya Manusia
- c. Ketidakpekaan Masyarakat
- d. Penerapan Sanksi Peraturan Daerah

##### **C. Upaya-Upaya yang dilakukan Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu untuk melakukan Pengawasan terhadap Usaha Karaoke Yang Melanggar Peraturan Daerah di Kabupaten Indragiri Hilir**

Upaya untuk mengatasi kendala dalam menjalankan pengawasan menurut Ibu Winda Tanjung Sari adalah:

- a. Penambahan Personil Tim Pengawas
- b. Mengajak Kerjasama Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM)
- c. Sosialisasi Peraturan Daerah
- d. Merevisi Peraturan Daerah.

## IV. SIMPULAN DAN SARAN

### A. SIMPULAN

1. Pengawasan yang dilakukan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Indragiri Hilir dalam melakukan Pengawasan terhadap usaha karaoke masih belum optimal karena masih ditemukannya beberapa usaha karaoke yang melanggar Peraturan Daerah.
2. Kendala yang dihadapi: Kondisi Geografis, Sumber Daya Manusia, Ketidakpekaan Masyarakat, dan Penerapan Sanksi Peraturan Daerah
3. Upaya yang dilakukan: Penambahan Personil Tim Pengawas, Mengajak Kerjasama LSM, Sosialisasi Peraturan Daerah, dan Merevisi Peraturan Daerah.

### B. SARAN

1. Agar dilakukannya sosialisasi Peraturan Daerah kepada seluruh lapisan masyarakat sehingga masyarakat dapat melakukan pengawasan terhadap usaha karaoke tersebut.
2. Agar dalam pembangunan tempat hiburan terutama karaoke, tidak berdekatan dengan Rumah Ibadah untuk terciptanya ketertiban umum dan kenyamanan masyarakat dalam melaksanakan beribadah.
3. Pemberian Izin Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP) atau perpanjangan izin perlu dilakukan evaluasi secara ketat dalam proses perizinan untuk mencegah adanya usaha karaoke yang berpotensi melanggar Peraturan Daerah.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku-Buku

Trisna, Raditya, 2015, *“Persepsi Masyarakat Pekanbaru Terhadap Tempat Club Executive Karaoke Di Jalan Sudirman, Kota Pekanbaru”*, Program Sarjana, Universitas Riau: Pekanbaru.

Soerjono Soekanto, 1983, *Pengantar Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta

Laporan Final RP12-JM KABUPATEN INHIL (2015-2019)

### B. Perundang-Undangan

Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pembinaan, Pengawasan, dan Penindakan Ketertiban Umum, dan Penyakit Masyarakat

### C. Sumber Lainnya

<https://bertuahpos.com/hukum/tak-berizin-tempat-karaoke-new-paradise-di-inhil-rayakan-valentine-hingga-subuh.html>, diakses pada tanggal 13 oktober 2021 pukul 13.00 WIB

## UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada Dosen Pembimbing Dan dosen Penasehat akademik, Ibu **Dr. Sanidjar Pebrihariati R, S.H. M.H.**, yang telah mendedikasikan waktu serta masukan sehingga Karya Tulis ini dapat terselesaikan. Serta kepada pihak-pihak yaitu:

1. Dekan Fakultas Hukum, Ibu Dr. Uning Pratimaratri S.H., M.Hum
2. Ketua Bagian HTN, Bapak Dr. Desmal Fajri S.Ag., M.H
3. Pihak-pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.